

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

FAO memperkirakan bahwa kebutuhan global terhadap ikan dan produk hasil pengolahan ikan pada tahun 2015 meningkat hingga 183 juta ton. Hal ini berarti terdapat peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan jumlah permintaan di tahun 1999/2000 yang mencapai 133 juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat global terhadap produk perikanan sangat tinggi sehingga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tiap tahunnya permintaan terhadap produk perikanan meningkat sebesar 3.1 % (Novriadi, 2015: hal 1).

Dengan potensi yang besar, sektor perikanan dan kelautan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan para pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013: hal 4).

Setiap tahun permintaan komoditi perikanan dari dalam maupun luar negeri menunjukkan peningkatan. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditi perikanan yang mampu bersaing di pasar global, berpeluang untuk meraih pasar lebih banyak. Keberhasilan dalam pengelolaan permintaan akan bergantung pada bagaimana sistem dan lembaga terkait saling bekerja dengan harmonis membentuk aliran distribusi yang efisien dan memenuhi kepuasan konsumen (Rofik, 2010: hal 1).

Menurut Rochdianto (2000 *dalam* Perdana, 2008: hal 56), usaha ke arah pembudidayaan ikan di perairan umum kian hari terasa kian mendesak. Hal ini perlu dimaklumi karena usaha penangkapan ikan yang tidak diimbangi dengan usaha budidaya dan penebaran ikan (*restocking*), lambat laun akan mengganggu kelestarian sumber daya perairan. Bila di sungai dikenal budidaya ikan sistem

keramba, maka di danau atau waduk dapat diterapkan cara budidaya ikan dalam keramba jaring apung. Budidaya dengan sistem ini pada prinsipnya mirip dengan sistem keramba. Dalam LIPI (2010), para pembudi daya ikan memanfaatkan air (danau/waduk) sebagai lahan budi daya ikan. Mereka menggunakan sistem keramba atau biasa dikenal dengan keramba jaring apung (KJA). Keramba ini memiliki beberapa manfaat, seperti ikan di dalamnya akan lebih aman, sehingga memudahkan pemeliharaan. Selain itu, dengan ukuran keramba yang terbatas, ikan dapat dipanen dengan mudah, serta nilai ekonominya pun dapat langsung dihitung petani ikan. Menurut Kementerian Kelautan dan perikanan (2014: hal 36) jenis budidaya yang berkontribusi terbesar pada nilai produksi perikanan budidaya tahun 2013 adalah produksi budidaya tambak sebesar 38,08 % (Rp 42,48 triliun), sedangkan budidaya jaring apung sebesar 7,75 % (Rp 8,6 triliun) dan budidaya keramba sebesar 3,45 % (Rp 3,8 triliun).

Produksi perikanan budidaya yang termasuk dalam komoditas utamayang tertinggi adalah ikan nila (*Nile Tilapia*), setelah rumput laut (Lampiran 1). Kenaikan rata-rata produksi ikan nila per tahun adalah sebesar 31,61%. Menurut Bank Indonesia (2010: hal 1) Budidaya ikan nila disukai karena ikan nila mudah dipelihara, laju pertumbuhan dan perkembangbiakannya cepat, serta tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Selain dipelihara di kolam biasa seperti yang umum dilakukan, ikan nila juga dapat dibudidayakan di media lain seperti kolam air deras, kantong jaring apung, keramba, dan sawah.

Manajemen rantai pasok merupakan metode *integrative* untuk mengelola aliran barang / produk, informasi dan uang serta manajemen keseluruhan proses produksi, distribusi, dan pemasaran, di mana konsumen dihadapkan pada produk-produk yang sesuai dengan keinginannya dan produsen dapat memproduksi produk-produknya dalam jumlah, kualitas, waktu, dan lokasi yang tepat. Dalam konsep manajemen rantai pasok, semua fungsi yang terkait dengan pemenuhan tuntutan pelanggan selalu dilibatkan. Fungsi-fungsi tersebut adalah pengembangan produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan pelayanan (Pujawan, 2005& Siahaya, 2013: hal 12). Sedangkan menurut Cooper. Et al (1997: hal 2) manajemen rantai pasok adalah proses bisnis yang terintegrasi mulai dari produsen hingga konsumen akhir yang melalui *supplier* yang

menyediakan produk, layanan dan informasi dimana memberi nilai tambah pada konsumen.

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Di sektor perikanan perairan umum, kabupaten ini memiliki potensi yang sangat besar. Kabupaten Agam memiliki danau, yaitu Danau Maninjau dengan luas sebesar 9.737,5 ha dan beberapa sungai besar yang memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah (Triyanto, 2011). Kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan danau Maninjau didominasi oleh kegiatan perikanan budidaya dengan komoditas utama adalah ikan nila dan mas. Kegiatan budidaya ikan yang dilakukan sejak tahun 1992 ini di kawasan danau maninjau adalah mulai dari pembenihan, pendederan sampai dengan pembesaran untuk ikan nila sedangkan untuk ikan mas adalah pendederan dan pembesaran (LIPI, 2009). Aktifitas usaha perikanan ini menambah manfaat ekonomi danau Maninjau, yang sebelumnya pada tahun 1985 dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Pada mulanya jumlah keramba jala apung yang diusahakan sebanyak 12 unit dimana tiap unit KJA terdiri dari 4 petak, kemudian terjadi peningkatan jumlah keramba hingga 157 kali lipat atau menjadi sebanyak 1.886 unit (1996). Pada tahun 1997 terjadi kematian masal ikan akibat penurunan kualitas air, sehingga jumlah KJA mengalami penurunan. Pada tahun 2007 sampai dengan 2009 jumlah KJA mengalami peningkatan dari 10.148 unit pada 2007 menjadi 12.106 unit pada 2008 dan menjadi 15.051 unit KJA pada 2009 di hampir seluruh kawasan perairan danau. Estimasi sekarang jumlah KJA lebih dari 18.000 unit. Pada umumnya keramba yang diusahakan menggunakan model rakit dari kayu / bambu (sekarang mulai memakai rangka besi) dengan ukuran 5x5x4 meter. Ikan-ikan dalam KJA ini diberi makan dengan pakan buatan (pellet). Produksi ikan nila dan mas pada KJA antara tahun 2005 sampai dengan 2008 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebagai akibat terjadinya kematian masal pada awal tahun 2009 (LIPI, 2009). Sebagai gambaran perkembangan usaha budidaya perikanan dengan media KJA, diketahui dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat bahwa nilai produksi

untuk kabupaten Agam tahun 2010 berada pada angka Rp 800 milyar, dengan produksi mencapai 35 ribu ton (tabel 1).

Tabel 1. Wilayah / lokasi, Luas Usaha, Produksi dan Nilai Produksi perikanan Budidaya Air Tawar (Jaring Apung) di Provinsi Sumatera Barat 2010.

Kabupaten / Kotamadya	Luas Usaha (m²)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp 1.000,-)
KABUPATEN			
Pesisir Selatan	-	-	-
Padang Pariaman	-	-	-
Agam	720.000,00	35.247,30	824.278.600
Pasaman	-	-	-
50 Kota	4.350,00	26,92	503.404
Tanah Datar	17.125,00	87,65	1.630.290
Sijunjung	-	-	-
Solok	4.800,00	428,90	8.020.430
Kep. Mentawai	-	-	-
Pasaman Barat	-	-	-
Dharmasraya	2.200,00	52,12	974.644
Solok Selatan	-	-	-
KOTAMADYA			
Padang	-	-	-
Solok	-	-	-
Sawahlunto	1.000,00	5,80	108.460
Padang Panjang	-	-	-
Bukittinggi	-	-	-
Payakumbuh	-	-	-
Pariaman	-	-	-

Rantai pasok untuk produk pertanian cukup kompleks. Sistem logistik produk pertanian memiliki karakteristik tertentu dan memerlukan penanganan khusus dan berbeda, karena dipengaruhi oleh sistem produksi, sifat produk, dan konsumen itu sendiri. Rantai pasok pertanian di Indonesia melibatkan banyak aktor, mulai dari petani sampai ke konsumen. Namun karena kurangnya sistem kolektif langsung dari para petani kecil, sehingga banyak pelaku dan transaksi yang harus dilalui terlebih dahulu, hal ini akhirnya berdampak pada harga hasil pertanian yang tinggi (perdana, 2015).

Untuk memonitori dan mengevaluasi serta menjaga keberlangsungan suatu sistem rantai pasok dari suatu usaha atau perusahaan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai parameter-

parameter kinerja, seperti manajemen aset, profitabilitas, tingkat pelayanan, dan waktu pengiriman. Alat pengukur kinerja pada manajemen rantai pasok adalah dengan model SCOR, dimana model ini berdasarkan pada proses, dimana SCOR membagi proses menjadi *plan, source, make, deliver dan return* (Pujawan, 2005: hal 242& Paul, 2014: hal 111).

B. Perumusan Masalah

Sebagai daerah penghasil komoditi ikan air tawar yang potensial, usaha tani ikan keramba jala apung (KJA) di kecamatan Tanjung Raya ini perlu menerapkan sistem yang mampu menjadikan usaha ini efektif dan efisien serta terjaga keberlangsungannya. Petani KJA di danau maninjau memasok hasilnya ke berbagai daerah di provinsi Sumatera Barat, juga ke beberapa daerah di provinsi tetangga, seperti provinsi Riau dan Jambi. Jenis ikan yang banyak diusahakan adalah jenis ikan nila dan majalaya. Kebanyakan petani KJA di selingkar danau membudidayakan ikan jenis nila, karena minim resiko dan kemudahan dalam perawatan.

Dalam rantai pasok usaha ikan KJA ini *stakeholder* yang berperan antara lain adalah pembibit ikan (berada di dalam dan luar daerah kecamatan Tanjung Raya), pembudidaya ikan/ petani KJA, pemasok / distributor pakan ikan, pedagang pengumpul, buruh panen, pedagang besar, pedagang pengecer, pemerintah dan konsumen. Salah satu *stakeholder* usaha ikan KJA di maninjau memiliki faktor penghambat dalam usahanya, salah satunya skala usaha. Skala usaha yang dimiliki oleh petani yang masih dalam skala kecil atau terkendala modal. Selain itu, petani juga menjalankan usaha lain seperti berkebun dan sawah, yang menyebabkan petani tidak fokus ke usaha ikan kerambanya, serta hasil keramba yang tidak jarang juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Petani pun dinilai tidak berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar.

Kegiatan pemenuhan tuntutan pasar semestinya melibatkan banyak pihak / *stakeholder* yang terkait. Kegiatannya harus bersinergi antara satu sama lain, sehingga *stakeholder* sebaiknya melakukan rekayasa manajemen dengan menerapkan konsep Manajemen Rantai Pasok (MRP) atau *Supply Chain Management* (SCM). Semangat kolaborasi, integrasi dan koordinasi untuk

wujudkan sinergisme dalam rangka memuaskan konsumen akhir merupakan tujuan dari MRP sehingga rantai pasok tersebut mampu bersaing dan mendapatkan keuntungan.

Menurut Marimin (2010; hal 32), keberhasilan kelembagaan rantai pasok komoditas pertanian tergantung sejauh mana pihak-pihak yang terlibat mampu menerapkan kunci sukses (*key success factor*) yang melandasi setiap aktivitas di dalam kelembagaan tersebut. Kunci sukses tersebut antara lain: *trust building* (kepercayaan yang terbangun di antara anggota rantai pasok), koordinasi dan sistem kerja, kemudahan akses pembiayaan, dan dukungan pemerintah. Dalam survei awal penelitian diketahui bahwa ada beberapa kunci sukses yang tidak tersedia, yaitu akses pembiayaan dan dukungan pemerintah. Namun, usaha ikan nila KJA ini masih bisa berjalan dan tetap menghasilkan komoditi ikan nila.

Kebijakan dari pemerintah setempat kurang mengakomodir petani KJA, karena dinilai masih belum berkontribusi pada petani ikan KJA, yaitu kebijakan mengenai kuantitas penyuluh perikanan setempat yang masih kurang, kemudian juga pemerintah belum menemukan formula yang pas untuk menaungi dan mengatur sektor perikanan di selingkar danau maninjau ini. Keadaan ini dikarenakan masih terjadinya konflik kepentingan antara beberapa sektor yang berada di selingkar danau maninjau ini, diantaranya adalah sektor pariwisata yang menuntut terjaganya lingkungan sekitar agar menarik wisatawan untuk berkunjung, kemudian sektor sosial budaya yang menuntut terjaganya keseimbangan di daerah ini, serta yang tak kalah pentingnya adalah sektor energi yang juga mengambil peran di danau maninjau, dimana PLTA Maninjau yang menuntut ketersediaan debit air yang cukup untuk menggerakkan turbin. Akibat dari konflik kepentingan ini menyebabkan petani ikan KJA berjalan sendiri-sendiri tanpa perhatian dan bimbingan yang cukup. Penjabaran ini juga sesuai dengan Asnil et al, 2013.

Keterbatasan yang dirasakan oleh petani ikan KJA ini menyebabkan adanya kendala serta kelemahan yang berimbas pada tidak efektif dan efisiennya usaha yang dijalankan, seperti berikut:

1. Fluktuasi harga juga sering terjadi, yang dirasakan oleh petani saat menjual hasil panennya ke pedagang besar/ pengumpul. Fluktuasi harga

ini sangat dirasakan oleh petani KJA yang memiliki jumlah petak keramba yang sedikit (kurang dari 4 petak), dimana kuota tiap kali panen petani ini tidak bisa memenuhi permintaan dari pedagang besar. Harga biasanya sangat dipengaruhi oleh pedagang besar atau petani KJA dengan skala besar.

2. Permintaan komoditi perikanan oleh konsumen dalam kondisi segar dan masih utuh menyebabkan proses pemanenan dan *packing* harus dengan usaha ekstra sehingga biaya yang harus disisihkan juga ekstra. Kemudian juga lokasi konsumen juga sangat menentukan, bagaimana dan waktu panen ikan di KJA. Kinerja dari proses pemanenan dan *packing* ini harus diketahui, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan atau permintaan konsumen, dimana indikatornya adalah tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Kemudian apakah proses yang selama ini dilakukan apakah yang paling efektif dan efisien untuk produsen / petani.
3. Jaminan pembayaran petani KJA pada saat penjualan ikan hasil panennya juga terbatas, saat pedagang besar / pengumpul menjual ikan hasil panennya. Ikan dari petani baru akan di bayar saat pedagang pengecer telah menjual semua ikan yang dibawanya, yang menyebabkan resiko dari pedagang besar juga diberatkan pada petani.
4. Faktor cuaca yang dapat berubah drastis (hujan disertai badai), bisa menyebabkan perubahan struktur sedimentasi air danau, dimana elemen yang berada didasar danau dapat terangkat keatas, yang menyebabkan kadar oksigen dipermukaan danau menjadi berkurang, atau biasa disebut “tubo” oleh masyarakat lokal. Pada akhirnya kejadian secara drastis ini menjadi penyebab kematian masal pada ikan yang diusahakan di KJA. Perlu suatu pengorganisasian secara bersama oleh para *stakeholder* untuk mengadapi kejadian yang mendadak ini. Perlu dikaji kemampuan petani dan *stakeholder* lainnya dalam merespon perubahan eksternal seperti “tubo” ini terutama dalam penjualan. Informasi yang diperoleh oleh petani juga terbatas, baik mengenai harga, maupun prediksi cuaca yang sangat menentukan kualitas air danau. Faktor ini menyebabkan resiko petani menjadi lebih besar.

5. Untuk petani yang membutuhkan kredit modal dari perbankan juga tidak bisa lagi mengaksesnya, karena sejak tahun 2010 (setelah turbo tahun 2009) pihak bank rata-rata tidak berani lagi memberikan pinjaman pada petani ikan KJA karena menganggap berisiko tinggi. Sehingga perlu untuk petani mencari cara lain untuk mengembangkan atau menjaga keberlangsungan usahanya.

Berdasarkan analisa rumusan masalah diatas, maka timbulah pertanyaan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana struktur rantai pasok usaha ikan KJA di kecamatan Tanjung Raya?
2. Bagaimana kinerja rantai pasok ikan KJA oleh petani, pedagang besar dan pedagang pengecer sample di kecamatan Tanjung Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan struktur rantai pasok usaha ikan KJA di kecamatan Tanjung Raya.
2. Menganalisis kinerja rantai pasok ikan KJA oleh petani, pedagang besar dan pedagang pengecer kecamatan Tanjung Raya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan masukan serta informasi bagi stakeholder yang tergabung dalam rantai pasok usaha ikan KJA, antara lain:

1. Bagi peneliti agar dapat memberikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan baru di dalam keilmuan Agribisnis.
2. Bagi petani dan pengusaha perikanan KJA di selingkar danau Maninjau dapat mengetahui posisi usaha mereka serta dapat mengevaluasi dan mengembangkan usaha perikanan KJA.
3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan agar menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Serta dapat menjadi bahan penilai prospek pengembangan dan pembangunan pos-pos yang

perlu dibenahi dalam *supply chain* usaha perikanan ini agar dapat berkembang dan bersinergi dengan sektor lain di selingkar danau Maninjau.

